

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN LAINNYA TERHADAP EFEKTIVITAS BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Suzi Suzana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
Jl. Ahmad Yani Km 5,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail : suzi.suzanna@yahoo.com

Abstrak: Anggaran daerah merupakan dasar rencana keuangan dalam pelaksanaan pemerintahan terkait dalam pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka unit bisnis di daerah. Usaha tersebut akan dapat terwujud apabila pemerintah memberikan alokasi belanja daerah yang lebih besar untuk tujuan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini termasuk pada jenis penelitian *time series*, terhubung satu sama lain dalam runtun waktu yaitu dimana penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesa. Hasil Penelitian menunjukkan hubungan positif atau searah dengan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y), variabel dana perimbangan dan tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Sumber pendapatan lainnya (X_3) menunjukkan hubungan positif dengan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y), dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan lainnya yang sah tidak memberikan kontribusi pengaruh terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Variabel dominan dalam hal ini adalah faktor pendapatan asli daerah (X_1) yang sangat berpengaruh terhadap belanja daerah dalam pelaksanaan pemerintah kota Banjarmasin untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah secara efektif, dan efisien mencapai tingkat pelaksanaan kerja sesuai sasaran, mengarahkan pencapaian hasil-hasil produktivitas kinerja keuangan .

Kata Kunci : PAD, Dana Perimbangan dan Sumber Pendapatan Lainnya, Belanja Daerah

Latar Belakang

Upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah yang tertib, efektif dan efisien, pemerintah telah mengundang paket perundangundangan bidang keuangan negara setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 . Paket perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

UU Keuangan Negara secara tegas menyebutkan bahwa keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 merupakan produk reformis di bidang keuangan negara. Isi dan maksud pokok dari undang-undang ini antara lain menyatukan pengaturan dua sistem dalam keuangan negara, yakni sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun jika ditelaah secara mendalam latar belakang dan tujuan penyatuan tersebut tidak ditemukan dalam UU No. 17 Tahun 2003. Pembangunan daerah merupakan prinsip otonomi daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan

masyarakat, dengan prinsip transparansi, partisipasi dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dilakukan revisi dengan UU nomor 32 tahun 2004, dalam hal ini daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan dibantu oleh pemerintah pusat. Serta Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 33.tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Mardiasmo dalam Rahardjo Adisasmita (2011 : 3) otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Terkait dengan belanja daerah maka dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dalam menggali sumber keuangan sendiri dan didukung oleh dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta kabupaten/ kota yang merupakan dana yang dimiliki untuk dikelola dalam belanja daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, masalah anggaran memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yang harus bertumpu pada kepentingan umum yang dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan pertanggungjawaban yang transparansi dan akuntabilitas secara riil untuk masuk dalam siklus anggaran.

Anggaran daerah merupakan dasar rencana keuangan dalam pelaksanaan pemerintahan terkait dalam pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka unit bisnis di daerah. Usaha tersebut akan dapat terwujud apabila pemerintah memberikan alokasi belanja daerah yang lebih besar untuk tujuan tersebut. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam menangani pengelolaan keuangan daerah, tetapi terkendala ditingkat

pelaksanaan fiskal daerah yang berbeda antara provinsi, kabupaten dan kota.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah, dalam pengembangan potensi daerah tersebut maka perlu meningkatkan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari belanja modal dan belanja pegawai. Dimana pengelolaan PAD, Dana perimbangan dan Dana Non Keuangan perlu dikaji dalam penggunaan terhadap belanja daerah yaitu belanja Modal dan belanja pegawai serta belanja rutin lainnya. Agar tercipta outcome dari penggunaan APBN tersebut.

Dari kajian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Sumber Pendapatan Lain Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang akan dilakukan penelitian dalam hal ini adalah : Apakah PAD, Dana Perimbangan dan Sumber Pendapatan Lain berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin?

Kajian Literatur

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infra struktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu dalam masa desentralisasi seperti sekarang ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD masing-masing daerah dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modal (Dhani Wijaya 2012). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa salah satu faktor dalam penentu belanja modal adalah dari PAD.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerahnya sendiri. Dalam rangka otonomi

daerah dan desentralisasi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Adanya perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memunculkan timbulnya pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Namun dalam perkembangan yang ada PAD tidak dapat berperan seoptimal mungkin dalam memberikan masukan dana bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Dimana sebagian perusahaan daerah lebih mengutamakan kepentingan usahanya sendiri sehingga melupakan perannya sendiri sebagai pemasok sumber pendanaan daerah. Selain itu sumber pendapatan yang dianggap cukup besar seperti pajak dan retribusi tidak bisa diandalkan sebagai mana mestinya, seperti yang diharapkan oleh pemerintah.

Dana Perimbangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana Perimbangan Keuangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Pemerintah Daerah menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasi dalam belanja daerah. Penelitian empiris oleh Holtz- Eakin et. Al (1985) dalam Hariyanto dan Adi (2007) menyatakan terdapat kaitan antara dana transfer dari pemerintah daerah dengan belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Kegunaan DAK difokuskan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan DAK yang diarahkan ke dalam meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Dhani Wijaya, 2012).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU nomor 33 Tahun 2004) Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Belanja di lingkungan akuntansi komersial dapat di definisikan sebagai arus keluar dari asset atau segala bentuk penggunaan asset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau efektifitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas.

Menurut *Accounting Principle Board* statement nomor 4, belanja didefinisikan sebagai jumlah, yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau property lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima . Dari definisi tersebut, terlihat bahwa belanja terjadi dikarenakan penggunaan asset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operational entitas, sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus keluar kas.

Belanja di lingkungan akuntansi sector public di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasional program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi: a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah; h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

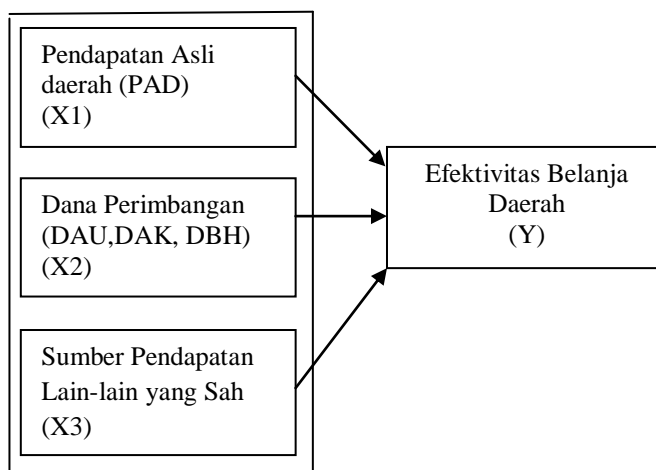
“Efektivitas merupakan tingkat pencapaian tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.” (Mardiasmo, 2005 : 133).

Dari berbagai pengertian diatas secara garis besar efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi sebagai suatu akibat dikehendaki. Efektivitas juga merupakan perbandingan antara out-come yang merupakan dampak dari suatu aktifitas tertentu dengan out-put.

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak terutama

penerimaan pajak hiburan, maka efektifitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hiburan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan pada teori yang telah dikemukakan, dapat ditunjukkan kerangka konseptual dari penelitian ini seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan hipotesis sbb :

1. Terdapat pengaruh secara parsial antara PAD, Dana Perimbangan, dan Sumber Pendapatan Lain terhadap efektivitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin
2. Terdapat pengaruh secara simultan antara PAD, Dana Perimbangan, dan Sumber Pendapatan Lain terhadap efektivitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Salah satu variabel independen berpengaruh dominan terhadap efektivitas Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk pada jenis penelitian *time series*, terhubung satu sama lain dalam runtun waktu yaitu dimana penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesa. Penelitian yang

dilakukan adalah mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sumber Pendapatan Lainnya terhadap Belanja Daerah

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin, sedangkan sampel penelitian Laporan Keuangan Pemkot Banjarmasin Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi liner berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS) yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independent terhadap variabel dependent , maka model penelitian ini dapat dirumuskan sbb :

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_{11} + \beta_2 X_{12} + \dots + \beta_3 X_{21} + \epsilon_1$$

Secara pengetahuan ekonomi , rumus tersebut diatas adalah penjelasan bahwa Efektivitas Belanja Daerah (Y) dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai X1 , Dan Perimbangan (X2) serta Sumber Pendapatan Lainnya (X3) dimana :

Y	= Belanja Daerah
B ₀	= Konstanta
B _{1,2,3} ,	= Parameter
X ₁	= Pendapatan Asli daerah (PAD)
X ₂	= Dana Perimbangan
X ₃	= Sumber Pendapatan Lain yang Sah
€	= Standar Error

Untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel (hubungan parsial) maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji – t statistik , sdangkan pengujian secara keseluruhan pengaruh variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) akan diuji dengan menggunakan uji F statistik dan koefisien Determinasi.

Pada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari data keuangan tersebut, maka diperoleh gambaran mengenai PAD, Dana Perimbangan Sumber Pendapatan Lainnya terhadap Belanja Daerah dengan mendapatkan data laporan keuangan pada

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kondisi keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dikelola pada SKPD / dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat penting untuk memberikan kontribusi pada aktivitas kerja di dalam lingkungan organisasi pemerintahan yang hal ini dikarenakan semakin tinggi dana yang dikelola berarti intensitas dana akan semakin tinggi pula. Pengetahuannya untuk melaksanakan pencatatan data keuangan lebih diperketat dalam pengawasan yang maksimal. Demikian pula kondisi laporan keuangan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang muncul kepermukaan dapat diketahui melalui langkah-langkah ilmiah sehingga kesahihan data dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah awal untuk menguji kebenaran hipotesis adalah menguji validitas dan reliabilitas semua alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian, dalam hal ini adalah data keuangan pemerintah kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada seluruh variabel yaitu variabel PAD, Dana Perimbangan dan Sumber Pendapatan Lainnya pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam hal ini akan diuji cobakan secara langsung kepada seluruh sampel sebanyak 10 sampel sesuai target penelitian yaitu nominal dana yang terkait dalam penelitian penulis.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas instrumen pada penelitian ini akan dilakukan terhadap 10 sampel sesuai target penelitian dengan subyek yang diteliti

Berdasarkan hasil uji validitas yang diterapkan pada 10 sampel data keuangan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. sebagai survey pendahuluan atau uji coba yang penulis lakukan pada tanggal 20 S.D 25 Januari 2017, diketahui bahwa karakteristik sampel data keuangan (PAD) yang berjumlah 10

item diketahui sebanyak 10 item valid dan berarti tidak terdapat data keuangan yang tidak valid/gugur.

Sedangkan data keuangan untuk belanja daerah pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. dalam hubungan yang menyangkut keuangan pemerintah kota Banjarmasin yang berjumlah 10 item data keuangan diketahui sebanyak 10 item yang valid yang berarti juga tidak terdapat data yang tidak valid/gugur. Uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment kemudian membandingkan r_{hasil} dari tiap item pernyataan dengan r_{Tabel} sebesar 0,3169 (10 sampel data keuangan) dengan asumsi jika r_{hasil} lebih besar dari r_{Tabel} maka item tersebut adalah valid dan jika r_{hasil} nya lebih kecil dari r_{Tabel} maka item data keuangan tersebut tidak valid. Sesuai dengan hal tersebut

Setelah diketahui jumlah item yang valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas instrumen yang berorientasi pada satu pengertian bahwa data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, uji reliabilitas sendiri menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan alat bantu *SPSS versi 20 for Windows*. Suatu data dikatakan reliabel jika nilai r alpha yang dihasilkan adalah positif dan lebih besar dari r Tabel.

Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai r alpha sebesar 0.775, dana perimbangan mempunyai r alpha sebesar 0.766, dan sumber pendapatan lainnya mempunyai r alpha sebesar 0.695. Sedangkan untuk belanja daerah mempunyai r alpha sebesar 0.763. Dari keempat nilai r alpha yang dihasilkan bernilai positif dan lebih besar dari r Tabel ($r_{\text{Tabel}}=0,3169$) yang berarti keseluruhan instrumen penelitian ini handal dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen yang dilaksanakan semua item yang tidak valid/gugur tidak akan digunakan sebagai alat ukur pada saat penelitian berlangsung.

Uji persyaratan klasik yang dilakukan sebelum data dimasukkan sebagai input

dalam analisis regresi berganda sebagai berikut:

a. Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini hasil pengujian nilai VIF semuanya di bawah dari 5 sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa data dari tiga variabel yang diteliti tidak ada masalah multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi mengandung korelasi serial atau tidak diantara variabel pengganggu. Menurut Nugroho (2008 : 62) Jika nilai Durbin watson hitung mendekati atau di sekitar angka 2, maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi, karena angka pada uji Durbin Watson terletak di daerah *No Autocorrelation*. Dalam penelitian ini, hasil dari uji Durbin-Watson adalah sebesar 1.295

c. Uji Normalitas

Pada penelitian ini, grafik uji normalitas (lampiran 3) terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan searah dengan garis tersebut, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi variabel dependen berdasarkan masukan dari variabel independennya.

d. Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena pada grafik *scatterplott* titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.(lampiran SPSS)

Setelah mengemukakan mengenai deskripsi variabel hasil penelitian yaitu variabel untuk melihat pengaruh variabel (X) meliputi Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y) dapat dijelaskan mengenai pengujian dari hipotesis.

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap variabel tergantung (Y) dengan menggunakan Uji Parsial (Uji t). Dengan melakukan Uji t, maka hipotesis kedua yang mengatakan bahwa faktor Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kota Banjarmasin akan dibuktikan kebenarannya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah membandingkan antara nilai t_{hitung} (th) dengan nilai t_{Tabel} (tt) pada taraf nyata (5%). Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa dari variabel pendapatan asli daerah (X_1) yang mempunyai nilai $t_{\text{hitung}} > \text{nilai } t_{\text{Tabel}} = 7.717 > 2.021$ berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5%) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Apabila dilihat dari t_{hitung} variabel bebas maka variabel pendapatan asli daerah (X_1) yang memiliki t_{hitung} 7.717 lebih besar dari t_{Tabel} sebesar 2.021 dengan probabilitas 0,000 dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan diduga bahwa faktor pendapatan asli daerah yang mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin terbukti.

Koefisien korelasi faktor pendapatan asli daerah (X_1) adalah sebesar 0,269, hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y) artinya apabila faktor pendapatan asli daerah (X_1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang diwujudkan dalam anggaran realisasi dalam pelaksanaan pemerintah kota Banjarmasin dapat, memenuhi kebutuhan belanja daerah dapat dijalankan secara efektif, dan efisien

untuk mencapai tingkat pelaksanaan kerja sesuai sasaran, mengarahkan pencapaian hasil-hasil produktivitas kinerja keuangan dan yang akan dicapai dapat berjalan lancar, maka belanja daerah akan meningkat dengan baik. Angka r^2 adalah 0,269 artinya bahwa kontribusi faktor pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah 26,9%, dengan catatan faktor lain adalah konstan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang diberikan dapat memberikan kontribusi pengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, oleh karenanya apabila pendapatan asli daerah tersebut dijalankan sesuai undang-undang dan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dengan benar dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan belanja daerah pemerintah kota Banjarmasin.

Pengaruh variabel (X) meliputi Dana Perimbangan (X_2) terhadap variabel Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dijelaskan mengenai pengujian hipotesis. Untuk menguji pengaruh variabel bebas yakni dana perimbangan (X_2) terhadap variabel terganggu (Y) dengan menggunakan Uji Parsial (Uji t). Langkah awal yang harus dilakukan adalah membandingkan antara nilai t_{hitung} (th) dengan nilai t_{Tabel} (tt) pada taraf nyata (5%). Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Perbandingan Antara Nilai t_{hitung} dengan Nilai t_{Tabel} Pada Taraf Nyata (5%)

No	Variabel Bebas	t_{hitung}	t_{Tabel}	r	P	Ket
1	X_1	7.717	2.021	0,269	0.000	Diterima

Tabel 2. Perbandingan Antara Nilai t_{hitung} dengan Nilai t_{Tabel} Pada Taraf nyata (5%)

No	Variabel Bebas	t_{hitung}	t_{Tabel}	r^2	P	Ket
2	X_2	6.002	2.021	207	0.000	Diterima

Tabel 3. Perbandingan Antara Nilai t_{hitung} dengan Nilai t_{Tabel} Pada Taraf nyata (5%)

No.	Variabel Bebas	t_{hitung}	t_{Tabel}	r^2	P	Ket
1	X_3	3.840	2.021	.114	0.000	Diterima

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa variabel dana perimbangan yang mempunyai nilai $t_{\text{hitung}} >$ nilai t_{Tabel} berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5%) tidak mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Nilai t_{hitung} untuk dana perimbangan $6.002 >$ t_{Tabel} sebesar 2.021 dengan probabilitas sebesar 0,005 lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$ atau lebih besar dari taraf nyata 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan (X_2) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin adalah signifikan.

Koefisien korelasi dana perimbangan (X_2) adalah sebesar 0.207, hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y) Artinya apabila dana perimbangan dilandasi pula dengan mengacu pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan didasarkan pada laporan keuangan dan standar yang berlaku yang digunakan. Dana yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan anggaran sehingga dapat mendukung pelaksanaan sesuai dengan peraturan pemerintahan tentang laporan keuangan yang wajar. Kesesuaian anggaran dan realisasi terkait dengan pendapatan asli daerah sangat penting dalam pelaksanaan belanja daerah terhadap misi organisasi. Dana perimbangan dalam pelaksanaan belanja tidak langsung akan meningkatkan potensi pemerintah daerah dan sebagai penopang dalam belanja langsung. Angka r^2 untuk variabel tersebut adalah 0.207 artinya bahwa dana perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin adalah 20,7%, dengan catatan faktor lain adalah konstan. Dengan demikian adanya dana perimbangan dapat menopang Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin

Setelah mengemukakan mengenai deskripsi variabel hasil penelitian yaitu variabel untuk melihat pengaruh variabel (X) meliputi sumber pendapatan lainnya (X_3) terhadap variabel Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y) dapat dijelaskan mengenai pengujian hipotesis.

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel sumber pendapatan lainnya (X_3) terhadap variabel tergantung (Y) dengan menggunakan Uji Parsial (Uji t). Dengan melakukan Uji t, maka hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa faktor sumber pendapatan lainnya (X_3) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin akan dibuktikan kebenarannya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah membandingkan antara nilai t_{hitung} (th) dengan nilai t_{Tabel} (tt) pada taraf nyata (5%). Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari variabel sumber pendapatan lainnya (X_3) yang mempunyai nilai $t_{\text{hitung}} >$ nilai $t_{\text{Tabel}} = 3.840 >$ 2.021 berarti bahwa variabel tersebut pada taraf nyata (5 %) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Apabila dilihat dari t_{hitung} variabel bebas maka variabel sumber pendapatan lainnya (X_3) yang memiliki t_{hitung} 3.840 lebih besar dari t_{Tabel} sebesar 2.021 dengan probabilitas 0,000 dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan diduga bahwa faktor sumber pendapatan lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin terbukti.

Koefisien korelasi faktor sumber pendapatan lainnya (X_3) adalah sebesar 0.114, hal ini menunjukkan hubungan positif atau searah dengan Belanja Daerah

Pemerintah Kota Banjarmasin (Y) . Artinya apabila faktor sumber pendapatan lainnya (X_3) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sebenarnya maka mampu menemukan unsur-unsur sumber pendapatan lainnya yang sah yang dapat mendorong pelaksanaan belanja daerah pemerintah kota Banjarmasin dan mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah untuk masa yang akan datang. Untuk penyusunan rencana anggaran pengembangan potensi belanja daerah perlu didukung dengan standar pengguna anggaran pada SKPD terkait yang realistis maka belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y) akan meningkat secara signifikan. Angka r^2 untuk faktor internal adalah 0.114 artinya bahwa kontribusi faktor sumber pendapatan lainnya yang sah terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin adalah 11,4 %, dengan catatan faktor lain yang juga diamati dalam penelitian ini adalah konstan.

Berdasarkan Uji serentak (Uji F) ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{Tabel} pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Dari hasil perhitungan data yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} $35.300 > F_{Tabel}$ 2.68 dengan probabilitas sebesar 0,000, hal ini berarti bahwa pada taraf nyata $\alpha=0,05$ dapat dikatakan pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2) dan sumber pendapatan lainnya (X_3) mempunyai pengaruh yang berarti terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin atau dengan perkataan lain bahwa dengan taraf nyata 5 %, hipotesis pertama diterima (terbukti).

Adapun besarnya kontribusi seluruh variabel pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), dan sumber pendapatan lainnya yang sah (X_3), ditunjukkan dengan angka R^2 sebesar 0.564. Angka ini mengandung arti bahwa seluruh variabel bebas pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), dan sumber pendapatan lainnya yang sah (X_3), yang digunakan dalam persamaan regresi ini, secara serentak (bersama-sama) mampu memberikan

kontribusi terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 0.564 atau dengan kata lain secara serentak (bersama-sama) berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 56,4% sedangkan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang ada.

Sedangkan Angka Multiple R adalah 0,751 artinya bahwa kontribusi faktor pendapatan asli daerah (X_1) terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Koefisien R^2 mengukur proporsi atau prosentasi total variasi dalam belanja daerah sebagai variabel Y yang dijelaskan oleh model regresi pada variabel X yakni pendapatan asli daerah. Terlihat Koefisien determinasi bergerak dari 0 sampai 1, karena memiliki angka / nilai 0,751 berarti semakin mendekati 1, dalam artian faktor pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2), serta sumber pendapatan lainnya yang sah (X_3) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja daerah yakni belanja yang bersifat tidak langsung maupun belanja yang bersifat langsung\.

Kesimpulan

Secara parsial dari persamaan regresi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan sehingga hasil hipotesa yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari masing masing variabel yakni pendapatan asli daerah (X_1) dana perimbangan (X_2) dan sumber pendapatan lainnya yang sah (X_3) terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin terbukti kebenarannya.

Secara simultan dari persamaan regresi dapat dikemukakan bahwa berdasarkan hasil uji F yang mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara regresi pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2) dan sumber pendapatan lainnya yang sah (X_3) terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin (Y) terbukti kebenarannya. Variabel Pendapatan asli daerah ditemukan ternyata mempunyai pengaruh yang dominan terhadap belanja daerah.

Tabel 4. Uji Simultan

F _{Hitung}	F _{Tabel}	R	R Square	Sig $\alpha = 0,05$
35.300	2.68	.751	.564	0,000

Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya yang sah terhadap belanja daerah pemerintah Kota Banjarmasin. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sektor pemasukan yang paling besar pengaruhnya terhadap belanja daerah, sehingga perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah daerah.

Pada dasarnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi yang diterima suatu daerah selama satu periode pencatatan. Pajak mencakup semua yang dibayarkan masyarakat pada pemerintah sebagai kewajiban seorang warganegara, sedangkan retribusi merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai balas jasa atas suatu layanan tertentu. Kedua sektor ini harus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan belanja daerah pada dasarnya harus sesuai anggaran yang telah ditetapkan daerah yang merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang dan memudahkan proses untuk menyelesaikan laporan keuangan. Dengan adanya dana perimbangan akan menunjang penerimaan kas daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak / hasil bukan pajak serta dana alokasi umum dan juga sumber pendapatan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang nantinya akan memudahkan dalam penggunaan dana pada berbagai permasalahan belanja daerah terutama yang berkenaan dengan SKPD terkait.

Berdasarkan pada hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penerimaan dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja daerah secara terstruktur sesuai dengan anggaran.

2. Dana perimbangan di harapkan dapat mendukung pelaksanaan belanja daerah pemerintah kota Banjarmasin
3. Sumber pendapatan Lainnya yang sah perlu ditingkatkan karena hal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE – Yogyakarta, Yogyakarta.
- Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat Jakarta
- Anggota IKAPI, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Fokusmedia Bandung
- Bastian Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Publik*, Salemba Empat Jakarta
- Elmi, Bahrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press Jakarta.
- Gade, Muhammad, 2002, *Akuntansi Pemerintahan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- J. Suprianto, 2009, *Statistik (Teori dan Aplikasi)*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mangkoesobroto, Guritno, , 2011, *Ekonomi Publik*, edisi keempatbelas penerbit BPFE-YOGYAKARTA
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, penerbit Graha Ilmu Yogyakarta.

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
-, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
-, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahh Pusat dan Daerah
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya
- Yuwono, Sony dkk, 2005, *Penganggaran Sektor Publik*, Bayumedia Publising, Surabaya